

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Frederikus Patu, Ika Devy Pramudiana
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: rikusfrede@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

25 Oktober 2023

Reviewed

02 November 2023

Accepted

12 November 2023

Published

29 Desember 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur. dengan menggunakan teori menurut George C. Edwards III menggunakan ada empat fariabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (Communicattions), Sumber daya (Resources) sikap (Dispositions atau Attitudes), Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan/ Obsevasi, wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori George C Edward III Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur bisa dikatakan Komunikasi sudah berjalan secara

maksimal dikarenakan pihak Dukcapil sudah efektif dan efesien dalam melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis wawancara pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni Tahun 2023, variable Sumber Daya maka dapat dikatakan dalam proses implementasi berjalan dengan baik dikarenakan materinya sosialisasinya ada berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, serta untuk variable disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan bagus dikarenakan beberapa faktor yaitu petugas yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur memberikan pelayanan sepenuh hati dan pastinya melayani masyarakat dengan baik. Struktur birokrasi ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan baik di karenakan terdiri dari semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, untuk SOP berjalan dengan baik dan petugas juga menjalankannya sebab SOP merupakan pendoman petugas ketika bekerja.

Kata kunci: Implementasi, Administrasi kependudukan, E-KTP Disabilitas.

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of E-KTP Population Administration Services for People with Disabilities in East Manggarai Regency. by using theory according to George C. Edwards III, there are four variables in public policy, namely communication (Communications), Resources (Resources), attitudes (Dispositions or Attitudes). The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this research include observation, interviews and documentation. Based on the results of research using George C Edward III's theory at the East Manggarai Regency Population and Civil Registration Service, it can be said that communication has been running optimally because the Dukcapil have been effective and efficient in carrying out socialization. Based on the results of the interview analysis on June 22 to June 28 of 2023, for the Resource variable, it can be said that the implementation process is going well because the socialization material is there based on the results of interviews with the community, and for the disposition variable it can be said that it has gone well and well due to several factors, namely officers who work at the East Manggarai Regency Dukcapil providing services wholeheartedly and definitely serve the community well. This bureaucratic structure is quite good and works well because it consists of all the officers in the East Manggarai Regency Dukcapil, the SOP runs well and the officers also carry it out because the SOP is a guide for officers when working.

Keywords: Implementation, Population Administration, Disability E-KTP.

PENDAHULUAN

Peristiwa kehidupan Manusia tidak terlepas dari suatu siklus kehidupan yang begitu banyak. Artinya kita akan mengalami banyak peristiwa penting di dalam kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting tersebut perlu di lakukan pencatatan karena diharapkan dapat terciptanya keadaan masyarakat yang tertip. Administrasi kependudukan sangat penting berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi kependudukan tersebut bisa di ketahui mengenai data-data penduduk serta informasi yang sesuai dengan kondisi penduduk serta daerah tempat tinggal penduduk.

(Siagian, 1967) Administrasi merupakan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Undang-Undang Nomor 5, 2014) Ini tertera pada Undang-Undang No 24 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertip administrasi secara nasional, Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa kependudukan dan setiap peristiwa penting yang di alami oleh penduduk atau oleh warga Negara Indonesia.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertipan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan public yang tidak hanya bagi Masyarakat normal tetapi juga untuk para penyandang disabilitas, yang mana sering sekali tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

(Subekti & Prasetya, 2021) Pasal 1 ayat (1) UU NO 8 tahun 2016 tentang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan sesama berdasarkan kesamaan hak.

(Nyanda Indarwati et al., 2023) Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat inovasi pelayanan bagi publik, sesuai dengan interuksi presiden nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *Electronics Government*. Inpres tersebut mempunyai beberapa poin mengenai pengolahan data dan pengolahan informasi serta proses manajemen kerja dengan menggunakan elektronik, E-KTP merupakan bagian dari produk yang di hasilkan oleh pemerintah. ini merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dukcapil Manggarai Timur sekarang melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Disabilitas. Kepala Dinas Dukcapil Robertus Bonafantura menjelaskan gerakan “jemput Bola” ini adalah program Mendagri yang melalui Dirjen Dukcapil. Sesuai dengan permendagri Nomor 96 Tahun 2019, ODGJ termasuk objek rentan Adminduk. Karena itu mulai melakukan pelayanan dokumen kependudukan bagi Disabilitas. Berikut ini Jumlah Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur Yang Sudah Punya KTP Dan Yang Belum Punya KTP, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur Yang Sudah Punya KTP Dan Yang Belum Punya KTP

No	Kecamatan	Jumlah	
		Punya KTP	Belum memiliki KTP
1	Borong	61	48
2	Lamba leda	18	19
3	Lamba Leda Selatan	12	2
4	Sambi Rampas	14	0
5	Elar	12	2
6	Kota Komba	18	11
7	Rana Mese	14	12
8	Lamba Leda Timur	23	8
9	Elar Selatan	11	4
10	Kota Komba Utara	12	4
11	Lamba Leda Utara	43	54
12	Congkar	1	1
Jumlah		239	165

Sumber: Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan data pada table diatas jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai Timur per Kecamatan yang sudah punya E-KTP sebanyak 239 jiwa dan yang belum memiliki E-KTP sebanyak 165 jiwa. Untuk kecamatan Borong yang memiliki KTP sebanyak 61 jiwa dan yang belum memiliki KTP sebanyak 48 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan Lamba Leda sebanyak 18 jiwa yang memiliki KTP dan 19 jiwa yang belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Selatan sebanyak 12 jiwa yang belum memiliki KTP dan 2 orang yang belum memiliki KTP. Untuk kecamatan Sambi Rampas yang memiliki KTP sebanyak 12 jiwa. Dan untuk Kecamatan Elar 12 jiwa yang memiliki KTP dan 2 orang belum memiliki KTP. Kecamatan Kota Komba 18 jiwa yang sudah memiliki KTP dan 11 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Rana Mese 14 jiwa memiliki KTP dan 12 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Timur 23 jiwa memiliki KTP dan 8 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Elar Selatan 11 jiwa memiliki KTP dan 4 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Kota Komba Utara 12 jiwa memiliki KTP dan 4 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Utara 43 jiwa memiliki KTP dan 54 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Congkar 1 orang memiliki KTP dan 1 orang lagi belum memiliki KTP. Total jumlah penduduk penyandang Disabilitas yang sudah punya KTP sebanyak 239 dan yang belum punya KTP sebanyak 169.

Berdasarkan pokok – pokok persoalan diatas maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebagai berikut Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Sedangkan menurut James E. Anderson (1970): Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials? (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut George C Edward III terlihat seperti ini:

1. Pengaturan Agenda
2. Membuat Kebijakan
3. Adopsi Dan Legitimasi Kebijakan
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Sementara itu, Aminullah di Muhammadiyah (2001: 371-bahwa kebijakan adalah upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi sistem (paragraf 372) pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya/tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh. Terakhir menurut kata Zainal Abidin (2004: 23), kebijakan publik itu tidak sempit dan terspesialisasi, tetapi strategis dan komprehensif. Oleh karenanya kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Sistematis dan ilmiah publik. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan kata atau frase “kebijakan”.” digunakan untuk menggambarkan tindakan satu atau lebih aktor di suatu area (seperti pejabat, organisasi, atau badan pemerintah).

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah Menetapkan tujuan dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan tersebut berinteraksi. (Nawi, 2018). Pengertian Implementasi kebijakan mencakup komponen-komponen berikut ini: 1) proses, yang didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan suatu peristiwa sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui suatu aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampaknya yaitu manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016). Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah keputusan dibuat sesuai melalui sumber daya yang tersedia. Kontrol yang efektif harus dilakukan untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan baik atau tidak.

(Nugroho, 2016). Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah keputusan dibuat sesuai melalui sumber daya yang tersedia.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016), yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta sikap atau disposisi. sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersedia, ada struktur organisasi untuk melakukannya, dan ada komunikasi yang relevan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh namun mereka juga bergantung satu sama lain dan langsung menuju implementasi.

Menurut George C Edward III implementasi dapat dimulai dengan pertanyaan tentang persyaratan untuk implementasi kebijakan yang berhasil. George C Edwards III Kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (attitudes or dispositions), dan organisasi birokrasi (bireaucratic structure).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Menurut George C. Edwards III Sebagai Berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap (Disposition)
4. Struktur Birokrasi

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan Prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi persyaratan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program konservasi energi dilaksanakan didasarkan pada gagasan George C. Edwards III. Implementasi dapat dimulai dengan penyelidikan prasyarat untuk implementasi kebijakan dan kondisi abstrak. Dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik Model implementasi dari George C Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Fokus pada prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi kriteria pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program konservasi energi dilaksanakan didasarkan pada gagasan George C. Edwards III. Menurut George C Edward III implementasi dapat dimulai dengan pertanyaan tentang persyaratan untuk implementasi kebijakan yang berhasil. George C Edwards III Kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (attitudes or dispositions), dan organisasi birokrasi (bireaucratic structure).

Ke empat faktor Hal tersebut di atas harus dipraktekkan secara bersamaan karena yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat.

Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana mencakup bagaimana beberapa aspek berinteraksi. Sub kategori faktor-faktor yang mendasari ditampilkan sehingga dampaknya terhadap implementasi dapat dilihat.

METODE PENELITIAN

Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan di peroleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, serta hubungan fenomena tertentu secara komperhensif dan integral dalam (Hutami,2017).

Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian di analisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi Administrasi Kependudukan Bagi Disabilitas. fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Disabilitas Di Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa, diantaranya Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber

melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan tertulis. dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut. (1) Pengamatan (Observasi), (2) Wawancara, (3) Dokumentasi dengan teknik Analisis Data (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data (datadisplay), (4) Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Berbagai penelitian yang relevan dengan tema dan materi skripsi ini telah banyak dilakukan, seperti Implementasi pelayanan E-KTP bagi Penyandang Disabilitas yang di muat dalam jurnal berikut ini. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi jempot bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas sudah cukup baik, namun ditemukan masalah terkait ketidaklengkapan salah satu fasilitas printer id card yang menjadi salah satu komponen penting sehingga tidak bisa diselesaikan pada saat hari yang sama selain itu tidak ada anggaran dana khusus bagi Disabilitas, Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan di lapangan, serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori Goerge C Edward III. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat dari keberhasilan kebijakan program melalui empat indikator yaitu komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan e-ktip bagi disabilitas di kabupaten manggarai timur ini melalui pihak Dukcapil sudah bekerja sama dengan Kecamatan dan juga Desa, agar setiap desa melaporkan warga masyarakatnya yang sebagai penyandang Disabilitas kepada pemerintah, namun belum semua Desa masif melaporkan nama-nama penyandang Disabilitas yang ada di Desanya Sehingga menghambat percepatan perekaman sepenuhnya di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai timur. Dan juga pihak Dukcapil akan turun langsung untuk melakukan perekaman E-KTP di setiap Desa namun yang menjadi penghambat ialah akses jalan menuju Desa-Desa pelosok yang rusak sehingga sangat sulit di lalui dan memakan waktu perjalanan sampai berjam-jam. Dan juga ketika akan melakukan perekaman di setiap Kecamatan atau Desa pihak Dukcapil mengeluarkan surat untuk Desa tersebut bahwa tanggal sekian ada jadwal perekaman untuk desa tersebut, dan Desa juga menyediakan fasilitas seperti tempat, kursi, meja dan juga termasuk sasaran warganya juga di tanggung oleh desa itu sendiri, namun yang menjadi penghambat ketika melakukan perekaman terhadap Disabilitas gangguan mental jiwa seringkali petugas mendapatkan perlawanan. Dan untuk sosialisasinya itu di lakukan secara umum dua kali setahun dan pemberitahuan ke desa akan di beritahukan ketika ada jadwal untuk perekaman di desa tersebut.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan

pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah..

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Dalam struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik di karenakan semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, dan untuk SOP juga di terapkan, Karena SOP merupakan pendoman petugas untuk melaksanakan perekaman, sebagai dasar hukum dan tolak ukur kedisiplinan petugas Dukcapil. SOP sudah dijalankan dengan baik dan tidak ada perbedaan dengan pelaksana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori George C Edward III Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur bisa dikatakan Komunikasi sudah berjalan secara maksimal dikarenakan pihak Dukcapil sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis wawancara pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni Tahun 2023. Menggunakan teori George c Edward III variable Sumber Daya maka dapat dikatakan dalam proses implementasi berjalan dengan baik dikarenakan materinya sosialisasinya ada berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, serta untuk variable disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan bagus dikarenakan beberapa faktor yaitu petugas yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur memberikan pelayanan sepenuh hati dan pastinya melayani masyarakat dengan baik. struktur birokrasi ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan baik di karenakan terdiri dari semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, untuk SOP berjalan dengan baik dan petugas juga menjalankannya sebab SOP merupakan pendoman petugas ketika bekerja.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C Edward III di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur tentang Implementasi pelayanan Administrasi kependudukan bagi disabilitas di Kabupaten Mangarai Timur variabel sumber daya pihak Dukcapil menyediakan materi sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Manggarai timur dan harus sering sosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan, dan untuk ketiga variabel komunikasi, disposisi, struktur birokrasi harus di pertahankan dan di jalani terus dalam proses implementasi kebijakan di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, A., Putra, R. H., Pasaribu, F. R., Aulia, A., & Ariyati, Y. (2022). *JIEE : TDS “ Tunggu Dirumah Saja ” Pada Dinas Kependudukan dan. 2(2), 62–70.*

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Bphn.Go.Id, 2003(1), 3.*

Kabupaten Manggarai Timur. Kependudukan dan pencatatan sipil (2019) *Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur (Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2018) No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018.* [https://www.manggaraitimurkab.go.id/component/tags/tag/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil.](https://www.manggaraitimurkab.go.id/component/tags/tag/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil)

- Manggarai Timur. Badan pusat statistic Kabupaten Manggarai Timur (2021). *Jumlah penduduk menurut jenis kelamin jiwa*. <https://manggaraitimurkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Nyianda Indarwati, Mardianto, M., & Mirani, D. (2023). Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.28>
- Pemerintah Indonesia (2006). *Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2006_23.
- RI, M. A. (2016). UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Sari, N. R. D., & Meirinawati. (2022). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” (Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar. *Publika*, 10(3), 909–922.
- Siagian, S. P. (1967). Administrasi kependudukan: konsep, dimensi, dan strateginya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., *Mi*, 5–24.
- Subekti, R., & Prasetia, I. B. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(2), 34–45. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i2.171>
- Undang-Undang Nomor 5. (2014). Tentang Administrasi Kependudukan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104.
- [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)